

***PERAN AKTOR COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM
PEMBANGUNAN DESA WISATA BERBASIS ECOTOURISM***

(Studi di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember)

**THE ROLE OF COLLABORATIVE GOVERNANCE ACTORS IN THE
DEVELOPMENT OF ECOTOURISM-BASED TOURISM VILLAGES**

(Study in Kemiri Village, Panti District, Jember Regency)

¹Nur Wahyu Endang Sulastri

Universitas Muhammadiyah Jember

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UM Jember, Jember

e-mail : Nurwahyuendangsulastri79@gmail.com

Abstrak

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dan memiliki peran yang cukup penting dalam pembangunan suatu Negara. Pembangunan pariwisata dapat melibatkan partisipasi para pemangku kepentingan baik dari pemerintah, masyarakat maupun swasta atau yang sering disebut dengan istilah kolaborasi sehingga dapat memberikan dampak yang positif. Berlakunya konsep kolaborasi telah menciptakan inovasi-inovasi pada masyarakat terutama pemerintah dan masyarakat desa, salah satu inovasi yang diwujudkan yaitu dengan menciptakan atau membangun sebuah daya tarik wisata desa atau desa wisata. Pemerintah Desa kemiri telah melakukan kolaborasi dalam pembangunan desa wisata berbasis *ecotourism*. Desa wisata berbasis *ecotourism* merupakan salah satu strategi dalam memobilisasi masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dengan menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan pariwisata serta upaya dalam pelestarian lingkungan baik alam maupun budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran aktor *collaborative governance* dalam pembangunan desa wisata berbasis *ecotourism* di Desa Kemiri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan teori yang digunakan adalah Emerson,dkk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *collaborative governance* berbeda dan tidak semuanya selaras, adapun fakta-fakta baru yang ditemukan bahwa kolaborasi relatif unik, dimana dalam kolaborasi masih memberikan ruang kepada aktor-aktor yang terlibat.

Kata Kunci : *Collaborative Governance, Desa Wisata, Ecotourism*

Abstract

Tourism is one of the leading sectors and has an important role in the development of a country. Tourism development can involve the participation of stakeholders from the government, the community and the private sector or what is often referred to as cooperation so that it can have a positive impact. The application of the concept of collaboration has created innovations in the community, especially the government and village communities, one of the innovations that have been realized is to create or build a village tourist attraction or tourist village. The Kemiri Village Government has collaborated in the development of ecotourism-based tourism villages. Ecotourism-based

tourism village is one of the strategies in mobilizing the community to play an active role in sustainable tourism development by making the community the main actor in tourism development and efforts to preserve the natural and cultural environment. This study aims to determine the role of Collaborative Governance actors in the development of ecotourism-based tourism villages in Kemiri Village. This study uses qualitative research with data collection techniques through observation, interviews and documentation as well as using primary data sources and secondary data sources. While the theory used is Emerson, et al. The results of this study indicate that collaborative governance is different and not all in harmony, while a new fact is found that collaboration is relatively unique, where collaboration still provides space for the actors involved.

Keywords: *Collaborative Governance, Tourism Village, Ecotourism*

I. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dan berperan penting dalam sebuah pembangunan Negara. Indonesia merupakan salah satu Negara yang dianugerahi potensi keindahan alam, keanekaragaman budaya dan kearifan lokal yang tidak dimiliki Negara lain. Potensi tersebut sangat berpotensi besar sebagai objek pariwisata yang dapat bernilai ekonomi tinggi dan akan bermanfaat bagi suatu daerah apabila dikelola menjadi sesuatu hal yang menarik. Maka dari itu, potensi pariwisata di Indonesia harus dibangun dan dikembangkan.

Pembangunan dan pengembangan pariwisata di Indonesia secara yuridis diatur dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata pasal 6 “Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.” Berdasarkan aturan tersebut, pembangunan pariwisata harus mencerminkan suatu hal yang unik, khas serta terdapat keanekaragaman alam dan budaya di setiap daerah.

Pembangunan pariwisata bagi pemerintah daerah menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 12 ayat 3(b) merupakan salah satu urusan pilihan. Berdasarkan aturan tersebut, pemerintah daerah memiliki wewenang dan pilihan dalam mengelola dan mengatur pariwisata yang ada didaerahnya.

Desa merupakan salah satu bagian dari daerah yang memiliki peran serta kontribusi yang cukup besar dalam kemajuan suatu daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 4(d) yang menyebutkan bahwa pengaturan desa bertujuan untuk “mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama” dan pasal 19(b) yang menyebutkan bahwa kewenangan desa yaitu meliputi “kewenangan lokal berskala desa.” Berdasarkan kebijakan tersebut dapat memberikan kewenangan yang lebih besar bagi para pembuat kebijakan dan masyarakat untuk dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di wilayahnya.

Potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan yaitu dengan membangun pariwisata yang dapat melibatkan partisipasi para pemangku kepentingan baik dari pemerintah, masyarakat maupun swasta sehingga dapat memberikan dampak yang positif. Pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan konsep kolaborasi tidak hanya terbatas pada partisipasi dalam hal perencanaan, namun juga melibatkan pembiayaan yang dilakukan melalui swadaya masyarakat maupun dari pihak lain dengan sistem atau model kerja sama. Berlakunya konsep kolaborasi telah menciptakan inovasi-inovasi pada masyarakat terutama pemerintah dan masyarakat desa yang telah diberikan wewenang secara khusus untuk mengatur pemerintahannya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu inovasi yang diwujudkan dalam pembangunan yaitu dengan menciptakan sebuah daya tarik wisata desa atau desa wisata.

Pemerintah Desa Kemiri merupakan salah satu pemerintahan desa di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember yang telah memanfaatkan potensi, peluang dan telah melakukan kolaborasi yang melibatkan peran masyarakat dan pemuda dalam pembangunan desa wisata berbasis *ecotourism*. Pemerintah Desa Kemiri relatif berhasil dalam membangun pariwisata berbasis *ecotourism*, sehingga Desa Kemiri merupakan satu-satunya desa yang menjadi pionir desa wisata di Kabupaten Jember. Sebutan *The Inspiring Village* kini tersemat pada Desa Kemiri yang merupakan desa pertama di Kabupaten Jember yang memiliki desa wisata dengan modal keyakinan, tekad serta perjuangan dari berbagai pihak melalui kerja sama. Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian yang berkaitan dengan *collaborative governance* dalam pembangunan. Sesuai dengan permasalahan yang ditemukan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini mengangkat judul “Peran Aktor *Collaborative Governance* Dalam Pembangunan Desa Wisata Berbasis *Ecotourism*”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana peran aktor dalam *collaborative governance* dalam membangun desa wisata berbasis *ecotourism* di Desa Kemiri ?

TUJUAN PENULISAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang ada, sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas akan hal tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran aktor *collaborative governance* dalam pembangunan desa wisata berbasis *ecotourism* di Desa Kemiri.

TINJAUAN PUSTAKA

Collaborative Governance

Collaborative atau yang lebih akrab dengan sebutan kolaborasi yaitu secara etimologi berasal dari kata *Co* dan *Labor* yang berarti sebagai penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan yang dimanfaatkan untuk mencapai sebuah tujuan yang telah di sepakati dan ditetapkan secara bersama. Sedangkan secara terminologi kolaborasi memiliki arti yang lebih luas dan umum yakni dengan menggambarkan situasi yang terjadi terkait kerja sama antara institusi atau dua orang maupun lebih yang saling memahami terkait setiap permasalahan dan berusaha dengan secara bersama-sama dalam memecahkan sebuah permasalahan (Choirul Saleh, 2020).

Istilah *Governance* berbeda dengan istilah *Government*, yang mana istilah *Government* yaitu pemerintah yakni sebuah lembaga atau orang yang memiliki tujuan untuk mengatur dan mengelola pemerintahan (*Governance*). Sedangkan istilah *governance* atau pemerintahan yaitu *merupakan the act, fact, manner of governing* yang berarti tindakan, fakta, pola serta kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Taufik, 2021)

Menurut Ansell *and* Gash (2008) bahwasannya *Collaborative governance* yaitu merupakan serangkaian pengaturan antara satu atau lebih pada lembaga

publik yang turut serta melibatkan para pemangku kepentingan non pemerintahan secara langsung dalam proses penyusunan kebijakan yang mengarah pada kesepakatan dan deliberatif yang bersifat formal dengan tujuan untuk membuat dan menerapkan suatu kebijakan publik maupun menyusun skema publik atau aset.

Menurut Agrawal Lemos (2007) bahwasannya *Collaborative governance* yaitu tidak hanya terbatas pada pemangku kepentingan yang hanya terdiri dari pemerintah dan non pemerintah tetapi juga terbentuk dari adanya *multi partner governance* yakni yang meliputi sektor swasta/privat, komunitas sipil, masyarakat serta dibangun atas adanya sinergi antara peran dari pemangku kepentingan dan bersifat hybrid dalam penyusunan rencana seperti kerja sama antara publik, privat dan sosial.

Collaborative governance yaitu dapat dipahami sebagai sebuah cara dalam pengelolaan sesuatu hal yang melibatkan para pemangku kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengarah pada musyawarah dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama. Para pemangku kepentingan yang dimaksud oleh beberapa pendapat yang sudah diuraikan diatas yaitu melibatkan peran dari pemerintah, swasta, komunitas sipil dan masyarakat. Namun dalam penelitian ini konsep *Collaborative governance* tidak selalu melibatkan peran dari pihak swasta, sehingga ada indikasi bahwa *collaborative governance* yang terjadi atas inisiasi atau kemauan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tidak melibatkan pihak-pihak luar dari pemerintahan itu sendiri.

Faktor Keberhasilan *Collaborative Governance*

Menurut Paul W. Mattessich (1992) bahwasannya faktor keberhasilan dari sebuah kolaborasi dapat dilihat dari 19 faktor yang diklasifikasikan ke dalam enam kelompok yaitu sebagai berikut :

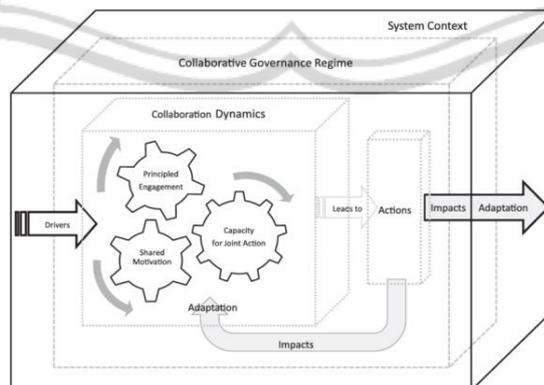
- a. Lingkungan, yaitu terdiri dari sejarah adanya kolaborasi (*history of collaboration exist*), pemimpin kolaboratif (*collaborative leader*), iklim politik/ sosial (*political/ social climate*).
- b. Keanggotaan, yaitu terdiri dari saling menghormati, memahami, dan kepercayaan (*mutual respect, understanding, and trust*), hanya anggota yang

sesuai (*appropriate cross-section of members*), kepentingan pribadi (*self interest*), kemampuan berkompromi (*ability to compromise*).

- c. Proses/ Struktur, yaitu terdiri dari kepemilikan bersama (*member share stake*), pengambilan keputusan pada berbagai tingkatan (*multiple layers of decision-making*), fleksibilitas (*flexibility*), pengembangan aturan yang jelas dan pedoman kebijakan (*development of clear roles and policy guidelines*), kemampuan beradaptasi (*adaptability*).
- d. Komunikasi, yaitu terdiri dari terbuka dan frekuensi komunikasi (*open and frequent*), membangun tautan komunikasi formal dan informal (*establish formal and informal communication link*).
- e. Tujuan, yaitu terdiri dari tujuan dan sasaran yang nyata dan dapat dicapai (*concrete, attainable goals and objectives*), visi bersama (*shared vision*) tujuan yang unik (*unique purpose*).
- f. Sumber Daya, yaitu terdiri dari dana yang cukup (*sufficient funds*) dan tenaga terampil disatukan (*skilled converner*).

Model Collaborative Governance

Model *collaborative governance* yaitu timbul atas adanya respon terkait masalah publik yang semakin kompleks, sehingga dalam menyelesaikan masalah tersebut dibutuhkan berbagai aktor didalamnya. Model *collaborative governance* dalam penelitian ini menggunakan model atau teori *collaborative governance* Emerson, dkk (2011) yang mengacu pada dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi serta dampak dan adaptasi yang digambarkan sebagai berikut :



Gambar Kerangka Kerja Integratif untuk *Collaborative Governance* model Emerson dkk.

Desa Wisata

Desa wisata menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : Pm.26/Um.001/Mkp/2010 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata bahwa pengertian Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Desa wisata menurut Edward Inskeep dalam Dinar Wahyuni (2019:94) mendefinisikan desa wisata sebagai bentuk pariwisata di mana sekelompok kecil wisatawan yang tinggal dalam suasana tradisional, biasanya di desa-desa yang terpencil dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat.

Desa wisata yaitu sebuah desa yang memiliki peluang potensi wisata yang memiliki sarana penunjang yang dapat disajikan dalam suatu wujud tatanan kehidupan masyarakat yang menyatu dengan sebuah tradisi.

Ecotourism

Istilah *Ecotourism* dalam bahasa Indonesia yaitu diterjemahkan sebagai Ekowisata. Ekowisata yaitu merupakan salah satu jenis pariwisata yang berwawasan lingkungan. Maksud dari pariwisata berwawasan lingkungan yaitu pariwisata yang berkaitan dengan aktivitas alam, yakni wisatawan yang datang diajak untuk melihat lebih dekat dengan alam, menikmati keaslian lingkungan sehingga dapat membuat para wisatawan tergerak untuk mencintai dan menjaga alam. Dalam perkembangannya aktivitas wisata tersebut sering dikenal dengan istilah *Back To Nature*.

Menurut Wood (2002) Masyarakat Ekowisata Internasional mengartikan Ekowisata yaitu sebagai perjalanan wisata alam yang bertanggung jawab dengan cara mengonservasi lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Adapun definisi ekowisata dapat dilihat dari tiga perspektif yaitu :

- a. Ekowisata sebagai produk, yaitu merupakan semua atraksi yang berbasis pada sumber daya alam.
- b. Ekowisata sebagai pasar, yaitu sebuah perjalanan yang diarahkan kepada upaya pelestarian lingkungan.

- c. Ekowisata sebagai pendekatan pengembangan, yaitu merupakan sebuah metode dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pariwisata secara ramah lingkungan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang diuraikan secara deskriptif. Menurut Sugiyono (2013:9) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember yang ditujukan untuk mengetahui dan menjelaskan peran aktor *collaborative governance* dalam pembangunan desa wisata berbasis *ecotourism*. Peneliti memilih Desa Kemiri sebagai lokasi penelitian yaitu bahwa Desa Kemiri merupakan Desa inspiratif yang memiliki desa wisata pertama kali di Kabupaten Jember yang dalam pembangunannya melibatkan peran dari masyarakat dan pemerintah Desa Kemiri dengan modal nol rupiah, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji dan mengulik bagaimana hal tersebut bisa terjadi.

Penentuan Informan Dan Sumber Data

Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Kemiri, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kemiri dan Masyarakat dan Tokoh Masyarakat Sentral serta Mantan Ketua Pengelola Desa Wisata.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:225) Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum yaitu melalui Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Observasi dilakukan secara partisipatif dengan terlibat pada saat Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) di Desa Kemiri, Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan draft wawancara sesuai dengan indikator menurut Emerson,dkk. Dokumen yang digunakan yaitu dikumentasi resmi dan pribadi. Dokumentasi didapatkan melalui sumber data primer dan sumber data sekunder.

Analisis Data dan Keabsahan data

Teknik analisis data yaitu merupakan sebuah proses pencarian dan penyusunan data yang dikumpulkan. Adapun dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan model Miles dan Huberman (1984) yang dijelaskan dalam Sugiyono (2013) dengan tahapan Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Penelitian kualitatif terdapat pemeriksaan terhadap keabsahan data. Keabsahan menurut Sugiyono (2013) yaitu Uji Kredibilitas (*Credibility*), *Transferability* (validitas eksternal), *Dependability* (reliabilitas), *Confirmability* (obyektivitas).

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini menggunakan teori atau model Collaborative Governance yang dikemukakan Emerson,dkk (2011). Emerson,dkk mengungkapkan bahwa setidaknya ada tiga (3) indikator yang memengaruhi kolaborasi.

1. Dinamika Kolaborasi

a. Penggerakan prinsip bersama

Dinamika kolaborasi dalam konteks penggerakan prinsip bersama menurut Emerson,dkk yaitu merupakan sebuah proses dalam berkolaborasi yang terjadi dari waktu ke waktu atau secara berkelanjutan yang dilakukan baik secara tatap muka maupun virtual. Penggerakan prinsip bersama mengacu pada pencapaian sebuah tujuan yang sama yang dilakukan melalui pengungkapan kepentingan, deliberasi (diskusi bersama) dan determinasi (penetapan agenda) secara bersama-sama oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi.

Berdasarkan sajian data, hasil observasi dan wawancara bahwa penggerakan prinsip bersama dalam berkolaborasi sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Emerson, dkk dimana dalam proses kolaborasi telah disepakati secara bersama-sama akan tujuan yang ingin dicapai yakni meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Kemiri. Selain itu

pada proses kolaborasi seringkali terjadi diskusi yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam program pembangunan desa wisata dengan agenda yang sudah ada dan dilakukan secara rutin dalam setiap minggu sekali atau satu minggu dua kali.

b. Motivasi Bersama

Dinamika kolaborasi dalam konteks motivasi bersama menurut Emerson, dkk yaitu merupakan sebuah dorongan yang terjadi dalam proses kolaborasi yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam menggapai tujuan tertentu. Siklus motivasi bersama yaitu mengacu pada sebuah kepercayaan bersama yang menghasilkan pemahaman atau pengertian bersama yang pada gilirannya menghasilkan legitimasi internal dan akhirnya komitmen.

Berdasarkan sajian data dan wawancara, siklus motivasi masih belum berjalan dengan baik, meskipun pada awal proses kolaborasi rasa saling percaya dan kesepahaman bersama itu ada, namun dalam perkembangannya kepercayaan masing-masing pihak perlahan mulai berkurang dan fluktuatif atau belum stabil, sehingga untuk melangkah kepada tahap terakhir yaitu adanya komitmen bersama masih terlihat ragu-ragu diantara beberapa pihak yang terlibat terutama masyarakat.

c. Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama

Kapasitas melakukan tindakan bersama dalam konteks dinamika kolaborasi menurut Emerson, dkk yaitu merupakan sebuah keharusan dalam menghasilkan sebuah kapasitas baru untuk aksi bersama yang tidak ada sebelumnya dan mempertahankan atau menumbuhkan kapasitas tersebut selama terdapat tujuan bersama. Kapasitas melakukan tindakan bersama menurut Emerson, dkk dikonseptualisasikan sebagai kombinasi dari empat elemen penting yaitu prosedur dan kesepakatan bersama, kepemimpinan, pengetahuan dan sumber daya.

Berdasarkan sajian data dan wawancara, kapasitas melakukan tindakan bersama terdapat satu fitur yang kurang selaras yakni terkait kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sebuah peran yang memiliki peran sebagai pihak yang menggali dukungan untuk turut serta

melakukan kolaborasi, sebagai penyelenggara, sebagai mediator, fasilitator serta dapat melakukan advokasi terhadap masyarakat. Kepemimpinan dalam konteks penelitian ini yaitu merupakan sebuah satu kesatuan, dimana semua pihak yang terlibat dalam satu kepengurusan bisa menjadi seorang pemimpin sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing namun pemegang kendali atau penanggung jawab masih berada pada satu orang yaitu kepala desa selaku penanggung jawab sebagai penyelenggara pembangunan desa wisata. Disisi lain pemegang kendali dari fasilitator lebih banyak didominasi oleh pemuda terutama berkenaan dengan komunikasi yang melibatkan masyarakat khususnya yang memiliki destrinasi. Elemen-elemen lain dalam penelitian ini seperti prosedur dan kesepakatan bersama, pengetahuan serta sumber daya relatif baik, yang mana dapat terbukti dengan adanya peraturan desa atau perdes yang mengatur tentang pengelolaan desa wisata, adanya SK untuk pengelola desa wisata sebagai legal standing, terdapat pengetahuan dan informasi baru yang diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi yang diterapkan misalnya pengembangan desa secara fisik yang diwujudkan dengan adanya desa wisata dan manajemennya, adanya pembagian peran dalam kolaborasi serta sumber daya yang meliputi pendanaan diawal pembangunan desa wisata, namun dalam perkembangannya sumber daya terkait finansial mengalami pasang surut sehingga membuat jalannya kolaborasi sulit berkembang.

2. Tindakan Kolaborasi

Tindakan dalam kolaborasi menurut Emerson, dkk yaitu merupakan sebuah tindakan yang pada praktiknya sangat beragam dan merupakan salah satu gambaran dari sebuah dinamika kolaborasi. Bagaimanapun tindakan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan atau diskusi dan lain sebagainya serta baik buruknya dapat dilihat dari pemahaman oleh para aktor yang terlibat dalam dinamika kolaborasi. Tindakan kolaborasi lebih mungkin untuk dilaksanakan apabila teori tindakan bersama diidentifikasi secara terus terang dan gamblang diantara pihak-pihak yang terlibat serta

fungsi dari sebuah dinamika kolaborasi untuk menghasilkan kapasitas yang diperlukan untuk tindakan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara, tindakan kolaborasi dalam membangun desa wisata yaitu terkait optimalisasi peran terutama peran dari pemerintah desa, terkait finansial dalam pengembangan desa wisata, serta keberhasilan atas terbentuknya sebuah organisasi yakni organisasi Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Terlepas dari peran salah satu pihak yang terlibat belum optimal, namun bisa dikatakan bahwa tindakan kolaborasi yang harus dilakukan yaitu tindakan terkait pendanaan atau finansial dalam pembangunan dan pengembangan desa wisata.

3. Dampak dan Adaptasi

a. Dampak

Dampak menurut Emerson, dkk yaitu merupakan perubahan keadaan yang disengaja maupun tidak disengaja dari perubahan kondisi yang sudah ada sebelumnya atau diproyeksikan yang telah dianggap tidak diinginkan atau membutuhkan perubahan atau yang terjadi selama proses kolaborasi. Dampak dapat berupa secara fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan serta politik. Dampak dapat berjangka pendek dan berdampak jangka panjang, selain itu dampak juga dibedakan menjadi dampak yang diharapkan seperti hasil positif dan dampak yang tidak diharapkan yaitu adanya kendala selama proses kolaborasi.

Berdasarkan hasil wawancara, adapun dampak positif diantaranya dampak sosial ekonomi yang berupa peningkatan perekonomian masyarakat khususnya para pelaku UMKM, terbukanya lapangan pekerjaan bagi kaum pemuda serta adanya popularitas yang positif terhadap Desa Kemiri sebagai Desa yang produktif. Adapun dampak atau kendala yang kurang diharapkan yaitu terkait finansial, faktor alam maupun situasi serta adanya ego sektoral dalam proses kolaborasi yang membuat pembangunan, pengembangan dan pengelolaan desa wisata masih belum berjalan secara maksimal.

b. Adaptasi

Berbagai dampak yang terjadi selama proses kolaborasi menghasilkan sebuah *feedback* atau umpan balik yang nantinya akan diadaptasi oleh kolaborasi. Adapun maksud dari Adaptasi yaitu merupakan bagaimana sebuah kolaborasi menyikapi umpan balik dari masing-masing pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah desa turut memberikan *feedback* yakni tetap mengawasi dalam pembangunan dan pengembangan desa wisata serta pemerintah desa turut serta membantu dalam pencarian solusi terkait finansial dan SDM kreatif. Selain itu *feedback* dari masyarakat yakni masyarakat berharap untuk kedepannya dapat dilibatkan dalam program-program lainnya dan *feedback* dari para pemuda yaitu masih tetap semangat dan solid untuk terus membangun, mengembangkan dan mengelola desa wisata meskipun pemerintah desa cenderung pasif.

Terdapat fakta-fakta baru yang ditemukan pada penelitian ini yaitu bahwa proses kolaborasi yang ditemukan unik dan berbeda dengan model Emerson,dkk, dimana proses kolaborasi masih memberikan ruang kepada aktor-aktor yang terlibat sedangkan *collaborative governance* Emerson,dkk merupakan kolaborasi yang menyatu satu sama lain. Peneliti menemukan bahwa setiap aktor yang terlibat, dalam hal ini masyarakat dan tokoh masyarakat pada pembangunan dan pengembangan desa wisata masih memiliki hak kepemilikan sendiri-sendiri terhadap destinasi yang ada, namun untuk kepentingan dan tujuan yang sama, masyarakat yang memiliki destinasi dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) tanpa menghilangkan kepemilikan yang sebelumnya. *Collaborative governance* yang ditemukan yakni terletak pada pola manajemen pengelolaan destinasi pada pembangunan dan pengembangan desa wisata berbasis *ecotourism* di Desa Kemiri.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisa peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa peran aktor *collaborative governance* dalam pembangunan desa wisata berbasis *ecotourism* di Desa Kemiri memberikan dampak yang positif yakni dampak sosial dan motif ekonomi. Namun, seiring pengembangan

desa wisata terdapat berbagai kendala yang terjadi sehingga kolaborasi masih belum berjalan dengan maksimal. Selain itu ditemukan fakta-fakta baru bahwa *collaborative governance* dalam penelitian ini relatif unik dan berbeda yakni masih memberikan ruang kepada aktor-aktor yang terlibat yang sebelumnya belum dibahas oleh teori atau model Emerson, dkk. Peran aktor *collaborative governance* dalam penelitian ini yaitu peran dari pemerintah desa sebagai penyelenggara dan finansial, peran pemuda sebagai fasilitator serta peran masyarakat yaitu sebagai pemilik destinasi.

Saran peneliti yang dapat disampaikan pada peran aktor *collaborative governance* dalam pembangunan desa wisata berbasis *ecotourism* di Desa Kemiri yaitu meningkatkan komunikasi antar aktor yang terlibat, khususnya komunikasi antara pemerintah desa dengan pihak-pihak lain yang bersangkutan dalam pembangunan dan pengembangan desa wisata. Selain itu, terkait kendala finansial, pemerintah desa bisa mengusahakan bantuan dana melalui Dana Desa atau bantuan pihak luar seperti investor atau dari pihak swasta maupun lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arun Agrawal, M. C. (2007). A Greener Revolution in the Making?: Environmental Governance in the 21st Century. *Environment: Science and Policy for Sustainable*, 4.
- Choirul Saleh, I. H. (2020). *Kolaborasi Pemerintahan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Chris Ansell, A. G. (2008). Collaborative Governance In Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 2.
- Kirk Emerson, T. N. (2011). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 10-19.
- Paul W. Mattessich, B. R. (1992). *Collaboration : What Makes It Work A Review of Research Literature on Factors Influencing Successful Collaboration*. Amerika: Wilder Foundation.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta .
- Taufik, A. (2021). *Manajemen Pemerintahan*. Surabaya: Global Aksara Pers.

Wahyuni, D. (2019). Pengembangan Desa Wisata Pentingsari, Kabupaten Sleman . *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 4.

Wood, M. E. (2002). *ECOTOURISM : Principles, Practices & Policies For Sustainability*. USA: United Nation Publication.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : Pm.26/Um.001/Mkp/2010
Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata

